

Pajak atas penghasilan (PPh) dari jasa angkutan perusahaan penerbangan asing (berdasarkan ketentuan domestik dan tax treaties) ditinjau dari asas kepatuhan dan asas kepastian hukum

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/bo/uiibo/detail.jsp?id=115882&lokasi=lokal>

Abstrak

[Dalam era globalisasi saat ini telah terjadi transformasi global yang digerakan oleh dua kekuatan besar, yaitu teknologi dan perdagangan. Proses transformasi tersebut berjalan dengan sangat cepat. Dibutuhkan suatu sarana penting untuk menunjang dinamika tersebut diantaranya sarana transportasi yang efisien, yaitu pesawat terbang. Awal industri penerbangan di Indonesia terjadi sekitar tahun 1949. Indonesia menjalin kerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda dengan mendirikan maskapai PT Garuda Indonesia Airways (GIA). Dengan berdirinya maskapai penerbangan nasional ini, mendorong industri penerbangan dalam negeri dengan berdirinya maskapai-maskapai penerbangan lain. Munculnya perusahaan penerbangan nasional membuka celah masuknya perusahaan penerbangan asing ke Indonesia. Perusahaan penerbangan asing tersebut dalam mengembangkan usahanya dengan mendirikan cabang. Berdasarkan ketentuan Treaty ataupun Undang-Undang Domestik pendirian cabang tersebut dikukuhkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tidak seperti pada ketentuan umumnya, BUT atas perusahaan penerbangan asing tidak dijadikan sebagai ambang batas pemajakan. Pemberian hak pemajakan secara eksklusif diberikan pada pusat efektif manajemen. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah upaya yang perlu dilakukan agar perusahaan penerbangan asing di Indonesia dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini terkait karena pengoperasian pesawat terbang mempunyai karakteristik yang bersifat khusus, sehingga pengenaan pajaknya pun bersifat khusus. Oleh karena itu, pemahaman atas pengoperasian perusahaan penerbangan secara cermat dan komprehensif perlu dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti: pejabat dan petugas pajak, konsultan pajak, wajib pajak dan IATA. Penelitian ini juga didukung dengan studi literatur guna mendapatkan teori dan peraturan yang tepat untuk mendukung penelitian ini. Adapun literatur yang diteliti seperti: karya ilmiah dan peraturan perpajakan berdasarkan Ketentuan Domestik maupun dalam Tax Treaty. Berdasarkan penelitian di KPP Badora I dan II ditemukan data bahwa dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) perusahaan penerbangan asing sudah baik. Hal ini disebabkan pada umumnya WP tersebut didampingi oleh konsultan. Tetapi dalam masalah pemahaman dan sosialisasi peraturan masih kurang. Sehingga sering timbul dispute antara petugas dan wajib pajak. Sampai saat ini pihak KPP Badora belum pernah melakukan sosialisasi secara rutin. Masalah ekstensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak juga belum dioptimalkan. Berdasarkan analisa yang dilakukan, proses sosialisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak perlu dilakukan. Sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman WP dan petugas pajak. Masih banyaknya perusahaan penerbangan asing yang belum terdapat merupakan alasan mengapa diperlukan proses ekstensifikasi pajak. Proses ekstensifikasi ini terutama ditekankan pada negara non treaty partner. Proses Intensifikasi berhubungan erat dengan informasi peredaran bruto dan pembukuan. Karena pengenaan pajak berdasarkan undang-undang domestik menggunakan norma, petugas pajak mempunyai kesulitan untuk mengidentifikasi jenis-jenis penghasilan lebih lanjut. Oleh karena itu disarankan agar proses sosialisasi dilakukan secara

intensif baik di kalangan petugas pajak dan wajib pajak. Upaya tersebut misalnya dengan menjalin kerja sama dengan asosiasi penerbangan internasional (IATA). Fasilitas dalam treaty yang berhubungan dengan pertukaran informasi hendaknya dimanfaatkan untuk mendukung proses intensifikasi pengenaan pajak.

, In the current era or global, there has been a global transformation instigated by two large forces. Namely technology and trade, such transformation process is taking place rapidly. Important facilities are required to support such dynamic, among other things efficient means of transportation such as airplanes. Airline industry

Indonesia dates back to 1949. Indonesia engaged in cooperation with the Government of Netherlands East Indies by establishing PT Garuda Indonesia Airways (GIA). The establishment of this national airline spurred the growth of domestic air transportation industry, as indicated by the establishment of outer-airlines.

The establishment of national airlines has opened the gate for the entry of foreign airlines to Indonesia. Those foreign airlines develop their businesses by opening branch offices. Pursuant to the provisions of Treaty or Domestic Laws, such newly opened branch offices should be confirmed as Permanent Establishments (PE). Notwithstanding the general rules, PE of foreign airlines is not functioning as a taxation threshold. Such exclusive taxation right is granted to effective management centers.

The main topic of this thesis is the efforts that need to be made for the proper fulfillment of the tax rights and obligations by foreign airlines. This is because the operation of airplanes has specific characteristics so as to require special taxation. Therefore, careful and comprehensive understanding of airline operations is required.

This research employed Analytical (Descriptive) method. The research instrument used was interview with the relevant parties. Such as: tax officials and officers. Tax consultants, taxpayers and IATA. This research was also supported by literary study in order to obtain the correct theories and regulations to support this research. Whereas the literature used in this research includes scientific works and tax regulations, based on Domestic Regulations and Tax Treaties.

The research conducted at Tax Service Office For Foreign Entities and Individuals (KPI Badora) I and II reveals some data that foreign airline Taxpayers have appropriately fulfilled their tax obligations. This is because consultants generally assist them. However, there is still lack of understanding and socialization of regulations. Accordingly, there are disputes between the officers and the taxpayers. Thus Tax. KPP Badora has never performed routine dissemination of information. The issues of enlarge and intensification of Taxpayers have not also been optimized.

Based on the analysis, it is necessary to perform tax socialization, enlarge and intensification. Socialization is aimed at improving the comprehension of taxpayers and tax officers. The large number of foreign airlines that have not been registered is the reason why lax enlarge process is required. Such enlarge process should be focused mainly on non-treaty partner countries. Intensification process is closely related to information on gross turnover and bookkeeping. Since taxation based on domestic laws is subject to norms, tax officers face difficulties in further identifying the types of revenues.

Therefore, it is recommended that the socialization process be performed intensively, both on tax officers and taxpayers. Such effort can be made, for instance, by engaging in cooperation with the international air transport association (IATA). Facilities provided in treaties related to exchange of information should be used for supporting the taxation intensification process.